

MUNCULNYA DATA BERBEDA DARI TPS DENGAN SIREKAP

# Kualitas Kamera HP Tentukan Akurasi OMR-OCR

**SLEMAN (KR)** - Dugaan kecurangan di website rekapitulasi hasil KPU, muncul dan berkecambah lewat media sosial. Ada yang angkanya sangat berbeda dari C-1 dari TPS dengan aplikasi Sirekap. Kualitas kamera handphone (HP) memang berperan dalam menentukan akurasi hasil Optical Mark Recognition (OMR) dan Optical Character Recognition (OCR).

Kepala Pusat Studi Forensika Digital Ull Yogyakarta Dr Yudi Prayudi menegaskan hal itu dalam siaran pers ke KR, Kamis (15/2) malam. Hal tersebut disampaikan karena banyaknya informasi melalui medsos mengenai indikasi kecurangan. Salah satunya seperti yang diposting TPS 85 Jakarta dimana hasil unggahan C-1 paslon nomor 01 mendapat 99 suara, paslon 02 mendapat 58 suara dan paslon 03 mendapat 87 suara. Namun setelah diupload di Sirekap, 01 menjadi 44 suara, 02 menjadi 948 suara dan 03 ti-

dak berubah. Menurut Yudi, secara umum terdapat dua kategori kesalahan hasil yang muncul pada website rekapitulasi KPU tersebut. Pertama kesalahan berasal dari sumber data Formulir C Hasil yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Kesalahan ini bisa meliputi kesalahan penulisan hasil penghitungan yang didapat para paslon, kesalahan dalam hal jumlah yang tidak konsisten antara pemilih dengan total hasil. Kesalahan-kesalahan ini lebih pada adanya human error dalam hal mengisi Formulir C Hasil. Sumber kesalahan bisa jadi karena kurangnya sosialisasi KPU terhadap petugas KPPS terkait cara pengisian Form C Hasil yang benar. Kesalahan bisa juga terjadi karena kelalaian dalam hal validasi dan verifikasi data TPS oleh KPPS.

Yang kedua, menurut Yudi, kesalahan dalam hal akurasi pembacaan informasi pada foto Formulir C Hasil yang diunggah petu-

gas KPPS. Kesalahan ini bisa jadi bersumber dari kualitas foto yang diunggah KPPS, misalnya tidak fokus dan buram. "Kesalahan terjadi karena kurangnya akurasi penerapan algoritma OCR dan OMR dalam mengekstraksi informasi data dan angka yang tertera pada foto Formulir C Hasil OMR dan OCR untuk membaca unggahan dokumentasi Hasil C Plano. OMR dan OCR adalah dua teknologi yang disiapkan dalam Sirekap," jelasnya.

Disebutkan, teknologi ini memungkinkan perangkat untuk menginterpretasikan dan memproses informasi dari gambar atau dokumen yang difoto atau discan oleh handphone. Dalam hal ini, handphone dengan spek kamera resolusi tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih detail dan jelas, dan akan memudahkan deteksi marka (OMR) dan pengenalan karakter (OCR) dengan lebih akurat. (Fsy)-f

## 2.325 TPS

mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU No 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, Sirekap yang digunakan KPU RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024. "Harus kami sampaikan, Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu, kemarin.

Bagja mengatakan, pihaknya mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, termasuk di media sosial. "Bahkan ada, sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa? *nggak* mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," paparnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan, Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

## Pelunasan

gagal sistem dalam pelunasan dan sedang pengobatan. Prioritas kedua, pendamping lansia, ketiga, katagori penggabungan keluarga istri/suami dan anak/orang tua yang terpisah berangkat di tahun berbeda (minimal sudah terdaftar 5 tahun lalu) dan prioritas pendamping disabilitas. "Jika setelah itu, masih terdapat kuota, akan diberikan kepada cadangan yang sudah melunasi Bipih di tahap pertama," ujar Aidi.

Dari data terakhir tertanggal 12 Februari, dari kuota 3.290 jemaah haji 2024 untuk DIY yang sudah mendapat penambahan

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan, pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut. "Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi sampai hari ini (kemarin) Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses, karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan, masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024. "Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui, Sirekap hanya alat bantu. Sedangkan, yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang 15 Februari sampai 20 Maret," katanya.

Pada bagian lain, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Bagja menjelaskan, temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga Kamis (15/2) pukul 06.00 WIB. "Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitung-

jemaah haji reguler yang sudah melunasi sebanyak 2.587 orang. Jumlah jemaah reguler yang melunasi diperkirakan akan bertambah.

Sedangkan data yang masuk prioritas pelunasan tahap kedua, yang mengalami gagal sistem sebanyak 13 orang, pendamping lansia 21 orang, penggabungan keluarga suami/istri dan anak/orang tua yang terpisah sebanyak 142 orang. Sedangkan, pendamping disabilitas, tidak ada yang mendaftar. "Jika nanti sisa kuota reguler diisi jemaah yang menjadi calon pri-

oritas pelunasan tahap kedua, sisanya diisi jemaah cadangan," ujarnya. Dari data, jumlah jemaah cadangan yang sudah melunasi sebanyak 614 orang.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota, sehingga jumlahnya menjadi 241.000. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

## Pasca-

oleh gerakan rakyat, harus dijadikan pelajaran penting. Semua elemen masyarakat tidak ingin kembali terjadi *chaos*. Karena rakyat lah yang akan jadi korban.

Pemilu damai tak hanya terkait dengan pelaksanaan kampanye tapi juga berelasi dengan hasil pemilu. Hal itu tibus diwujudkan melalui proses pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Jujur berarti semua pihak menjalankan segala aturan dan menaati hukum yang berlaku. Adapun adil bermakna objektif, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Adil juga bermakna kesetaraan terkait hak-hak mendasar manusia. Begitu pula di dalam konteks kemanfaatan atas nilai-nilai yang dianjurkan asas keadilan.

Pemilu yang jujur dan adil berarti pemilu yang dijalankan dengan mengutamakan etika, moral dan nilai-nilai kejujuran, objektivitas, kesamaan hak serta kebermampuan bagi semua. Dalam konteks penghitungan suara, jujur dan adil mewujudkan dalam hasil-hasil yang objektif dan benar.

Tidak ada manipulasi baik berupa penggelembungan suara bagi yang diuntungkan atau pengempisan suara bagi yang dirugikan.

Kejujuran dan objektivitas penyelenggara pemilu sangat menentukan masa depan negara dan bangsa. Semua pihak yang berkepentingan harus berpikir seribu kali jika ingin bermain dan memainkan hasil pemilu. Rakyat yang selama ini diam, adalah juru pengadil yang jujur dan objektif. Rakyat bisa menghukum penguasa yang tidak lurus hati (culas). † Bagi rakyat, hasil pemilu bukan sekadar angka, melainkan data dan fakta yang dihasilkan dari proses pergolakan pikiran, batin dan jiwa. Juga pergolatan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Data dan fakta itu sakral karena terkandung nilai kebenaran. Mengotak-atik data dan fakta demi kepentingan tertentu berarti mendistorsi kebenaran dan mengotori kesakralan hasil-hasil pemilu.

Rakyat tak main-main dalam menjaga

pemilu agar jujur dan adil. Hasil perolehan pemilu akan menjelma jadi wahana eksistensial bagi para para kontestan yang unggul untuk menjadi presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat dan daerah serta senator. Mereka punya peran yang strategis dalam distribusi keadilan dan penciptaan kesejahteraan rakyat.

Kualitas hasil pemilu sangat ditentukan kualitas proses. Pemilu yang berkualitas relatif mampu melahirkan para pemimpin yang berkualitas. Pemilu yang kadaden dan buruk akan menghasilkan pemimpin abal-abal.

Jangan memberi rakyat buah busuk demokrasi. Buah busuk, jika dimakan, akan meracuni tubuh dan berpotensi membunuh. Pertanyaannya, apakah para penyelenggara negara, pemerintahan dan pelaksana pemilu memberikan hasil yang terbaik dalam arti adil dan objektif bagi rakyat?

(Penulis adalah esais, praktisi budaya)-f

# Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Cukup

**JAKARTA (KR)** - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah cukup, meskipun terjadi kenaikan harga disebabkan beberapa faktor.

"Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman," kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan di Jakarta, Kamis (15/2).

Whisnu mengatakan, Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan dan pengawasan produksi serta pendistribusian beras di berbagai daerah, menyusul terjadinya kenaikan dan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Target pengawasan dan pemantauan dilakukan di daerah yang menjadi sentra produksi beras, karena beberapa daerah memiliki perbedaan karakteristik dalam teknis pendistribusiannya. "Kami juga melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur pendistribusiannya, sehingga diharapkan diharapkan tidak ada daerah yang kekurangan stok beras," katanya.

Whisnu mengatakan, untuk tempat penggilingan beras, gudang-gudang penyimpanan, toko ritel modern dan pasar tradisional terus dipantau untuk mengetahui kondisi terkini terkait produksi dan pasokan beras bila mengalami hambatan.

Kegiatan monitoring ketersediaan dan harga beras di daerah, kata Whisnu, dikendalikan langsung oleh masing-masing Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda di satuan wilayah dan

nantinya dilaporkan ke Satgas Pangan Bareskrim Polri. "Kegiatan monitoring juga bekerja sama dengan dinas provinsi terkait guna memastikan kondisi di lapangan," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi. "Pascahari pemungutan suara Pemilu (14 Februari 2024) ke-marin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali," kata Arief usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau stok pangan terutama beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

Arief menyampaikan, bantuan pangan beras 10 kg yang akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, merupakan bagian dari program intervensi Pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan utamanya komoditas tersebut. Arief menyebut, realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada KPM hingga 7 Februari mencapai 185.000 ton. Target penyaluran pada dua bulan pertama di 2024 adalah 440.000 ton.

Arief juga memastikan stok beras dalam kondisi aman. "Kalau untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tentunya tugas Pemerintah menyeimbangkan antara hulu sampai hilir," katanya. (Ant/San)-f

## PDIP

adalah partai harus berhasil melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Partai-partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan perolehan 2,83 persen suara, Partai Perindo 1,43 persen suara, Partai Gelora 0,93 persen suara, Partai Hanura 0,85 persen suara dan Partai Buruh dengan suara 0,74 persen.

Kemudian, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan

perolehan suara 0,50 persen, Partai Garuda suara 0,40 persen dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan perolehan suara 0,33 persen.

Pemilu 2024 diikuti 18 parpol dan enam parpol lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh. (Ant)-f

## Mantan

dari gudang arsip, filling kabinet, lemari-lemari penyimpanan dokumen untuk dimusnahkan. Dokumen yang dimusnahkan antara lain berkas keuangan berupa pembukuan, laporan keuangan, kuitansi, nota-nota dan lainnya.

"Pemusnahan dokumen tersebut dilakukan dengan cara tersangka MT memerintahkan kepada staf PMI Kota Yogyakarta untuk menghubungi UD Sregep yang bergerak di bidang usaha pencacahan kertas untuk diolah menjadi bubur kertas," terang mantan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DIY ini.

Akibat perbuatan tersangka MT mengakibatkan audit keuangan PMI Kota Yogyakarta menjadi terkendala. Perbuatan tersangka MT melang-

gar Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Penanganan perkara ini untuk memberikan efek jera bagi tersangka MT maupun lainnya agar menjadi pembelajaran bagi siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan menghilangkan atau memusnahkan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk menutupi perbuatan korupsi," pungkas Saptana. (Sni)-f

## Gugatan

untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu (31/1).

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pen-

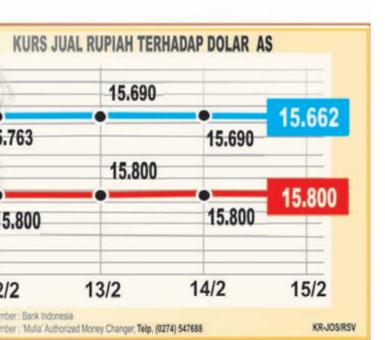
tuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman. (Ant/Has)-d

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pen-

## Dewas

HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK. Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau melaksana pemilu memberikan hasil yang terbaik dalam arti adil dan objektif bagi rakyat?

(Penulis adalah esais, praktisi budaya)-f



KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

## Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir

## Gunakan Hak Pilihmu Sekarang, Jangan Menyesal Kemudian

**Raden Arditya Mutwara I.**  
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

**MENJELANG** hari H pemilihan umum atau pemilu serentak di seluruh Indonesia, telinga kita akan familiar dengan kata golput. Ya, istilah golput atau golongan putih sejatinya tidak akan Anda temukan di

UU No.7 Tahun 2017. Akan tetapi, istilah ini sudah terdengar sejak puluhan tahun yang lalu. Mengutip detik.com, tepatnya menjelang pemilu tahun 1971 sekelompok pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar memproklamasikan gerakan moral yang dikenal dengan istilah Golongan Putih. Gerakan ini muncul karena mereka merasa saat itu wadah politik tidak mampu mewakili aspirasi rakyat.

Seiring perkembangan jaman dari waktu ke waktu, apakah golput masih menjadi gerakan yang sama? Sebagai bentuk protes? Atau justru menjadi gerakan yang sama sekali baru? Menukil dari beberapa harian nasional tanah air, saat ini golput terbagi menjadi dua jenis. Pertama, golput akibat masalah teknis. Kedua, golput karena merasa tidak ada calon yang mampu mewakili aspirasi mereka atau setidaknya layak untuk dipilih.

Kita bahas dari alasan yang pertama yakni golput akibat masalah teknis. Orang-orang yang masuk golput ini sebetulnya hendak memberikan suara mereka, hanya saja ada beberapa kendala seperti sedang berada di daerah lain saat hari pemungutan suara, belum mendapat undangan mencoblos, hingga kehabisan kertas suara karena masuk daftar pemilih khusus (DPK). Banyak hal-hal teknis yang membuat orang-orang ini kesulitan memberikan hak pilihnya. Sedangkan untuk alasan yang kedua jelas adalah golput sebagai bentuk protes, artinya mereka dengan sengaja tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya.

Dalam gegap-gempita pesta demokrasi yang hanya digelar lima tahunan ini, sangat disayangkan apabila masyarakat Indonesia secara umum tidak menggunakan hak pilihnya. Banyak yang berganggapan bahkan dengan sinis mengatakan bahwa siapapun presiden atau pemimpin yang terpilih nanti tidak akan berpengaruh banyak pada kehidupannya. Padahal, bisa jadi pengaruh itu tetap ada hanya saja tidak secara langsung kita rasakan. Jadi marilah gunakan hak pilih yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Meskipun sekali lagi kalau Anda memilih golput, negara tidak akan memberi sanksi kecuali sampai mengajak orang lain untuk ikut golput.

Angka pemilih pemula tahun ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dikutip dari cnnindonesia.com, angka pemilih pemula mencapai 10,94 % atau sama dengan 22,4 juta jiwa dari keseluruhan jumlah pemilih di Indonesia. Pilihlah pemula jangan sampai golput supaya bisa ikut merasakan atmosfer atau "vibes" pemilu tahun ini. Kenyataan bahwa untuk pertama kalinya "suara" mereka ikut didengar adalah sesuatu yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itulah, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita menggunakan "hak" untuk memilih. Karena bisa jadi saat ini pilihan itu belum terasa dampaknya tetapi beberapa tahun yang akan datang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi.

Jangan sampai akhirnya kita sebagai pemegang hak pilih yang sah justru tidak menggunakannya sebaik mungkin. Kesempatan di pemilu yang lima tahun sekali ini menjadi kesempatan langka dan mungkin salah satu cara kita terlibat langsung untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan sampai kita gagal memberi contoh kepada para pemilih pemula dengan menjadi golput dan abai terhadap hak-hak yang melekat pada kita. Apapun hasilnya dan siapapun pemimpin negara yang terpilih nanti akan menentukan babak baru untuk bangsa ini dan untuk kita semua yang bernaung di bawah bendera Indonesia. Gunakan hak pilihmu sekarang, jangan sampai menyesal kemudian. Salam demokrasi.

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**  
Creative Economy Park